BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terkait pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK), Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat Upah Minimum Regional (UMR) di Kota Kediri selama periode 2010-2024, dapat disimpulkan bahwasanya

1. **Indeks Harga Konsumen (IHK)** tidak menunjukkan hubungan yang berarti terhadap penentuan upah minimum di Kota Kediri. Karena fluktuasi IHK yang tidak konsisten atau karena IHK hanya merupakan salah satu indikator inflasi. Mengingat inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, maka IHK tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi inflasi secara utuh. Hal ini membuat pengaruhnya terhadap penetapan upah minimum menjadi tidak signifikan secara statistik
2. **Pertumbuhan Ekonomi** Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap upah minimum kota (UMK) di Kota Kediri. Artinya, ketika Peertumbuhan Ekonomi nmeningkat, UMK justru cenderung menurun atau tidak mengalami kenaikan yang sebanding. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri belum berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, terutama bila pertumbuhan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas sektor padat karya. Struktur ekonomi yang lebih didominasi oleh sektor padat modal dan tingginya

efisiensi perusahaan dapat menyebabkan dunia usaha menekan biaya tenaga kerja, sehingga memengaruhi keputusan penetapan UMK.

3. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** memiliki pengaruh signifikan terhadap upah minimum. Kualitas sumber daya manusia yang semakin baik, yang tercermin dari aspek pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran masyarakat, cenderung mendorong peningkatan nilai upah minimum sebagai bentuk pengakuan terhadap standar hidup yang lebih tinggi.

5.2 Saran

Atas kesimpulan yang sudah ditarik, beberapa saran dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak terkait.

1. Pemerintah Kota Kediri disarankan untuk lebih memperhatikan beragam indikator ekonomi dan sosial secara menyeluruh dalam menetapkan kebijakan upah minimum. Penetapan upah sebaiknya tidak hanya berpatokan pada satu indikator tertentu, tetapi mempertimbangkan aspek yang saling terkait seperti kondisi pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta kualitas hidup tenaga kerja. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
2. Hasil daripada penelitian ini diharapkan bisa jadi masukan yang berharga bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan pengupahan, terutama pemerintah daerah dan lembaga terkait. Temuan empiris dalam studi ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara indikator makroekonomi dengan upah

minimum, yang dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika pembangunan daerah. Dengan demikian, kebijakan pengupahan yang diambil dapat bersifat adaptif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pekerja secara nyata.

3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan supaya memperluas cakupan wilayah atau menambahkan variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi upah minimum, seperti tingkat pengangguran, angka kemiskinan, atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Dengan memperluas variabel dan wilayah kajian, penelitian mendatang akan mampu memberikan hasil yang lebih komprehensif dan generalisasi yang lebih kuat. Hal ini penting guna mendukung perumusan kebijakan pengupahan yang lebih akurat dan relevan dengan kondisi sosial ekonomi di berbagai daerah.